

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERBARU (LIST OF NEW LAWS AND REGULATIONS) JULY 2026

Jenis Peraturan (Types of Regulation)	Nomor (Number)	Judul	Title	
PERIODE BULAN JULI 2026 (SECOND PERIOD OF JULY 2026)				
RUU		SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	National Education System	
		KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI	Chamber of Commerce and Industry	
		PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA	The Indonesian International Financial Center	
PP	31/2026	KONSESI BAGI PENYANDANG DISABILITAS DAN INSENTIF BAGI PERUSAHAAN	Concessions for Persons with Disabilities and Incentives for Companies	
	30/2026	JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN HUKUM	Types and Tariff of Non-Tax State Revenue Applicable to the Ministry of Law	
	23/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	The Second Amendment to Regulation of the Government Number 41 of 2021 on the Organization of Free Trade Zones and Free Ports	
RPP		RESTRUKTURISASI DAN PRIVATISASI BADAN USAHA MILIK NEGARA	Restructuring and Privatization of State-Owned Enterprises	
PERPRES	40/2026	PEMBENTUKAN KEJAKSAAN NEGERI PANGANDARAN, KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SERANG, KEJAKSAAN NEGERI TANA TIDUNG, KEJAKSAAN NEGERI KUBU RAYA, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH KOTA, KEJAKSAAN NEGERI RAJA AMPAT, DAN KEJAKSAAN NEGERI PESISIR BARAT	Establishment of the Pangandaran District Prosecutor's Office, Serang Regency District Prosecutor's Office, Tana Tidung District Prosecutor's Office, Kubu Raya District Prosecutor's Office, Lima Puluh Kota District Prosecutor's Office, Raja Ampat District Prosecutor's Office, and Pesisir Barat District Prosecutor's Office	
	38/2026	PENGEMBANGAN KEWIRAUUSAHAAN NASIONAL	National Entrepreneurship Development	
	37/2026	RENCANA INDUK EKONOMI KREATIF TAHUN 2026-2045	2026–2045 Creative Economy Master Plan	
	34/2026	PENDIDIK KLINIS	Clinical Educators	
	33/2026	HAK KEUANGAN DAN FASILITAS LAINNYA BAGI KEPALA, WAKIL KEPALA, SEKRETARIS BADAN, DEPUTI, KEPALA SATUAN PEMERIKSAAN INTERN, TENAGA PROFESIONAL, DAN KELOMPOK AHLI BADAN OTORITA PENGELOLA PANTAI UTARA JAWA	Financial Entitlements and Other Benefits for the Chairperson, Vice Chairperson, Secretary of the Authority, Deputy, Head of the Internal Audit Unit, Professional Personnel, and Expert Group of the North Coast of Java Management Authority	
	28/2026	PENYELENGGARAAN INVESTASI PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI	Implementation of Development Investment for the Acceleration of Economic Growth	
INPRES	8 Tahun 2026	PENYELAMATAN POPULASI DAN HABITAT GAJAH SUMATERA DAN GAJAH KALIMANTAN	Conservation of the Populations and Habitats of the Sumatran Elephant and the Bornean Elephant	
KEPPRES	14/2026	PENETAPAN DAERAH HUKUM KEJAKSAAN NEGERI PANGANDARAN, KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN SERANG, KEJAKSAAN NEGERI TANA TIDUNG, KEJAKSAAN NEGERI KUBU RAYA, KEJAKSAAN NEGERI LIMA PULUH KOTA, KEJAKSAAN NEGERI RAJA AMPAT, DAN KEJAKSAAN NEGERI PESISIR BARAT	Designation of the Territorial Jurisdictions of the Pangandaran District Prosecutor's Office, Serang Regency District Prosecutor's Office, Tana Tidung District Prosecutor's Office, Kubu Raya District Prosecutor's Office, Lima Puluh Kota District Prosecutor's Office, Raja Ampat District Prosecutor's Office, and Pesisir Barat District Prosecutor's Office	
PERMEN KEUANGAN	50/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR	The Third Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 26/PMK.010/2022 on the Establishment of the Goods Classification System and the Imposition of Import Duty Tariffs on Imported Goods	
	49/2026	TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI YANG DILAKUKAN MELALUI SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK ATAS TRANSAKSI DIGITAL LUAR NEGERI	Procedures for the Collection of Value-Added Tax on Cross-Border Digital Transactions through the Cross-Border Digital Transaction Tax Collection System	
	47/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 64 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN DANA ABADI DAERAH	The Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 64 of 2024 on Procedures for the Establishment and Management of Regional Endowment Funds	
	45/2026	PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR PERSENJATAAN, AMUNISI, PERLENGKAPAN MILITER DAN KEPOLISIAN, TERMASUK SUKU CADANG, SERTA BARANG DAN BAHAN YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MENGHASILKAN BARANG BAGI KEPERLUAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA	Exemption from Import Duty on the Importation of Arms, Ammunition, Military and Police Equipment, Including Spare Parts, and Goods and Materials Used in the Manufacture of Goods for the Purposes of National Defense and Security	
	44/2026	PERSYARATAN UNTUK MENJADI KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KUASA DI BIDANG PERPAJAKAN	Requirements for Appointment as a Tax Representative and Procedures for the Exercise of Rights and Fulfillment of Obligations of Tax Representatives	
PERMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM	6 Tahun 2026	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Procedures for the Formulation of Regulation of the Minister of Investment and Downstream Industry/Head of the Investment Coordinating Board	
	5 Tahun 2026	PENILAIAN TERHADAP KINERJA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN KINERJA PERCEPATAN PELAKSANAAN BERUSAHA	Assessment of the Performance of One-Stop Integrated Services and the Performance of the Acceleration of Business Licensing Implementation	
	4 Tahun 2026	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Security Classification and Access System for the Dynamic Records of the Ministry of Investment and Downstream Industry/Investment Coordinating Board	
	3 Tahun 2026	JADWAL RETENSI ARSIP KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Records Retention Schedule of the Ministry of Investment and Downstream Industry/Investment Coordinating Board	
	2 Tahun 2026	KLASIFIKASI ARSIP KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	Records Classification of the Ministry of Investment and Downstream Industry/Investment Coordinating Board	
PERMEN PANRB	13 Tahun 2026	PENERIMAAN PESERTA DIDIK SEKOLAH KEDINASAN	Admission of Students to Official Service Schools	
	12 Tahun 2026	PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	Granting of Performance Allowances to Employees within the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform	
	11 Tahun 2026	JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG TRANSPORTASI	Functional Positions in the Field of Transportation	
	10 Tahun 2026	JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	Functional Position of Election Oversight Governance Officer	

PERMEN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	10 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Higher Education, Science, and Technology Number 39 of 2025 on Higher Education Quality Assurance</i>	
	9 Tahun 2026	AKREDITASI JURNAL ILMIAH	<i>Accreditation of Scientific Journals</i>	
PERMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BP2MI	7 Tahun 2026	PENYELENGGARA VOKASI PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>Providers of Vocational Education and Training for Indonesian Migrant Workers</i>	
	6 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of the Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers Protection Agency Number 1 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of the Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers Protection Agency</i>	
PERMEN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	10 Tahun 2026	PENAMBAHAN DAFTAR NEGARA, PEMERINTAH WILAYAH ADMINISTRATIF KHUSUS SUATU NEGARA, DAN ENTITAS TERENTU YANG DIBERIKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN	<i>Expansion of the List of Countries, Special Administrative Region Governments of Foreign States, and Specified Entities Eligible for Visa-Free Visits</i>	
	9 Tahun 2026	PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	<i>Planning for the Requirements of State Property within the Ministry of Immigration and Correctional Affairs</i>	
PERMEN KEHUTANAN	9 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Forestry Number 1 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Forestry</i>	
PERMEN PERHUBUNGAN	PM 5/2026	PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 45 TENTANG TANDA IDENTIFIKASI PRODUK DAN ARTIKEL SERTA TANDA KEBANGSAAN INDONESIA DAN TANDA PENDAFTARAN INDONESIA PESAWAT UDARA SIPIL INDONESIA	<i>Civil Aviation Safety Rule Part 45 on Product and Article Identification Marks, and Indonesian Nationality and Registration Marks for Indonesian Civil Aircraft</i>	
	PM 4/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 8 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN ANGKUTAN MULTIMODA	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Transportation Number PM 8 of 2012 on the Organization and Operation of Multimodal Transport</i>	
PERMEN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN EKONOMI KREATIF/BADAN EKONOMI KREATIF	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Creative Economy/Head of the Creative Economy Agency Number 1 of 2024 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Creative Economy/Creative Economy Agency</i>	
PERMEN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	4 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	<i>Organization of Cooperation within the Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions</i>	
PERMEN DALAM NEGERI	15/2026	PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Transfer of Housing Infrastructure, Facilities, and Public Utilities to Regency/City Governments</i>	
PERMEN KEBUDAYAAN	4 Tahun 2026	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	<i>Legal Documentation and Information Network of the Ministry of Culture</i>	
	3 Tahun 2026	TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN KEBUDAYAAN	<i>Official Correspondence Manual of the Ministry of Culture</i>	
PERMEN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BKKBN	3 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	<i>Organization of Public Information Services within the Ministry of Population Affairs and Family Development/National Population Affairs and Family Planning Agency</i>	
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	10 Tahun 2026	SISTEM REGISTRASI UNIT KARBON	<i>Carbon Unit Registry System</i>	
	9 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGENDALIAN PERUBAHAN IKLIM BERBASIS MASYARAKAT	<i>Organization of Community-Based Climate Change Control Programs</i>	
PERMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3 Tahun 2026	PEDOMAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	<i>Guidelines for Information and Documentation Management within the Ministry of Women Empowerment and Child Protection</i>	
PERMEN PEKERJAAN UMUM	14/2026	PEDOMAN PENETAPAN TARIF JALAN TOL TRANS SUMATERA RUAS BETUNG (SP. SEKAYU)-TEMPINO-JAMBI SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	<i>Guidelines for the Determination of Toll Road Tariffs for the Betung (Sekayu Junction)–Tempino–Jambi Section of the Trans-Sumatra Toll Road as Non-Tax State Revenue at the Ministry of Public Works</i>	
PERMEN SOSIAL	5 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL	<i>The Second Amendment to Regulation of the Minister of Social Affairs Number 2 of 2025 on the Organization and Work Procedures of the Ministry of Social Affairs</i>	
PERMEN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	4 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG VERIFIKASI BADAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG MENGAJUKAN PERMOHONAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL LOGAM DAN BATUBARA DENGAN CARA PEMBERIAN PRIORITAS	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Micro-, Small-, and Medium Scales Enterprises Number 4 of 2025 on the Verification of Small and Medium Enterprises Applying for Mineral Metal and Coal Mining Business License Areas through the Priority Allocation Mechanism</i>	
PERMEN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	4 Tahun 2026	SATU DATA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, IMIGRASI, DAN PEMASYARAKATAN	<i>One Data Policy of the Coordinating Ministry for Legal, Human Rights, Immigration and Correctional Affairs</i>	
KEPMEN KETENAGAKERJAAN	200/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI AKTIVITAS TELEKOMUNIKASI, PEMROGRAMAN KOMPUTER, KONSULTANSI, INFRASTRUKTUR KOMPUTASI, DAN JASA INFORMASI LAINNYA GOLONGAN POKOK AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTANSI KOMPUTER, DAN AKTIVITAS TERKAIT BIDANG INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES PROJECT MANAGEMENT	<i>Establishment of the Indonesian National Work Competency Standards for the Telecommunications, Computer Programming, Consultancy, Computing Infrastructure, and Other Information Services Category, Main Group of Computer Programming, Computer Consultancy, and Related Activities, in the Field of Information and Communication Technologies Project Management</i>	
	199/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI INDUSTRI GOLONGAN POKOK INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YANG TIDAK TERMASUK DALAM LAINNYA (YTDL) BIDANG INDUSTRI ALAT BERAT	<i>Establishment of the Indonesian National Work Competency Standards for the Manufacturing Category, Main Group of Machinery and Equipment Manufacturing Not Elsewhere Classified (NEC), in the Field of Heavy Equipment Manufacturing</i>	
	188/2026	PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI PERTAMBANGAN DAN PENGALIAN GOLONGAN POKOK PERTAMBANGAN MINYAK BUMI MENTAH DAN GAS ALAM BIDANG PEMROSESAN GAS ALAM	<i>Establishment of the Indonesian National Work Competency Standards for the Mining and Quarrying Category, Main Group of Crude Petroleum and Natural Gas Extraction, in the Field of Natural Gas Processing</i>	
KEPMEN LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	2412/2026	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE NASIONAL TAHUN 2026-2055	<i>National Mangrove Ecosystem Protection and Management Plan 2026–2055</i>	
KEPMEN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	275/2026	PIAGAM PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL	<i>Internal Audit Charter of the Ministry of Communication and Digital Affairs</i>	
KEPMEN KEUANGAN	48/MK/BC/2026	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duty on Mining Products Subject to Export Duty</i>	

	41/MK/BC/2026	PENETAPAN JENIS SATUAN BARANG YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERITAHUAN PABEAN EKSPOR	<i>Determination of the Types of Units of Goods Used in Export Customs Declarations</i>	
KEPMEN KESEHATAN	HK.01.07/MENKES/641/2026	PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN TEKNOLOGI KESEHATAN SECARA MANDIRI (STAKEHOLDER LED SUBMISSION)	<i>Guidelines for the Implementation of Independent Health Technology Assessment (Stakeholder-Led Submission)</i>	
KEPMEN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN	M.IP-07.GR.01_01 Tahun 2026	WILAYAH KOORDINASI PENERBITAN PASPOR, PENERBITAN SURAT PERJALANAN LAKSANA PASPOR DAN VERIFIKASI PEMBERIAN VISA PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA ATAU TEMPAT LAIN DI LUAR NEGERI	<i>Jurisdictional Areas for Passport Issuance, Issuance of Passport-Substitute Travel Documents, and Verification of Visa Issuance at Diplomatic Missions of the Republic of Indonesia or Other Locations Abroad</i>	
KEPMEN ESDM	285.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE KEDUA BULAN JULI TAHUN 2026	<i>Reference Prices for Metal Minerals and Reference Coal Prices for the Second Period of July 2026</i>	
	282.K/MG.03/MEM.M/2026	HARGA MINYAK MENTAH INDONESIA BULAN JUNI 2026	<i>Indonesian Crude Oil Price for June 2026</i>	
	250.K/MG.01/MEM.M/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 91.K/MG.01/MEM.M/2023 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG INDUSTRI	<i>The Third Amendment to Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 91.K/MG.01/MEM.M/2023 on Designated Natural Gas Users and Designated Natural Gas Prices in the Industrial Sector</i>	
KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	225/2026	PEDOMAN PERJENJANGAN BUKU	<i>Guidelines for Book Level Classification</i>	
	224/2026	BUKU NONTEKS PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH	<i>Non-Textbooks for Basic Education and Secondary Education Institutions</i>	
	220/2026	BUKU TEKS PENDAMPING PADA SATUAN PENDIDIKAN JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH	<i>Supplementary Textbooks for Basic Education and Secondary Education Institutions</i>	
	203/2026	KEBIJAKAN KERANGKA KERJA MANAJEMEN RISIKO PEMBANGUNAN NASIONAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	<i>National Development Risk Management Framework Policy within the Ministry of Primary and Secondary Education</i>	
KEPMEN PERDAGANGAN	1559/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAM BEA KELUAR	<i>Benchmark Export Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duty</i>	
KEPMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/ KEPALA BP2MI	1160/2026	PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENILAIAN POTENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>Technical Guidelines for the Organization of Competency Potential Assessments for Civil Servants within the Ministry of the Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers Protection Agency</i>	
	1125/2026	PETUNJUK TEKNIS PEMETAAN PASAR KERJA LUAR NEGERI	<i>Technical Guidelines for Mapping Overseas Labor Markets</i>	
	1117/2026	PENETAPAN DESA MIGRAN EDUKATIF, MAJU, AMAN, DAN SEJAHTERA	<i>Designation of Educative, Advanced, Safe, and Prosperous Migrant Villages</i>	
SE MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	11 Tahun 2026	PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN DAN ANTISIPASI KEBAKARAN DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA) SAMPAH PADA KONDISI CUACA PANAS EKSTREM	<i>Enhancing Preparedness for and Anticipation of Fires at Waste Final Disposal Sites (TPAs) during Periods of Extreme Hot Weather</i>	
	10 Tahun 2026	PERINGATAN HARI MANGROVE SEDUNIA TAHUN 2026	<i>Commemoration of World Mangrove Day 2026</i>	
SE MENTERI KEHUTANAN	SE.5/MENHUT/SETJEN/KUM.02/7/2026	PELAKSANAAN PEMULIHAN EKOSISTEM SEBAGAI KEWAJIBAN REHABILITASI DAERAH ALIRAN SUNGAI DI KAWASAN SUAKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM OLEH PEMEGANG PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DAN PEMEGANG PERSETUJUAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN AKIBAT TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN	<i>Implementation of Ecosystem Restoration as an Obligation for Watershed Rehabilitation in Nature Reserve Areas and Nature Conservation Areas by Holders of Forest Area Use Approvals and Holders of Forest Area Release Approvals Resulting from Forest Area Exchanges</i>	ILB 5537/Juli 20, 2026
SE MENTERI PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	18/2026	PEMBATASAN PENGGUNAAN GAWAI DI SATUAN PENDIDIKAN	<i>Restrictions on the Use of Electronic Devices in Educational Institutions</i>	
	17/2026	MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH RAMAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN PADA JALUR PENDIDIKAN NONFORMAL DAN JALUR PENDIDIKAN INFORMAL	<i>Implementation of a Child-Friendly School Orientation Program for Educational Institutions Providing Non-Formal Education and Informal Education</i>	
	16/2026	PELAKSANAAN TRANSISI PASCA PENATAAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BARU	<i>Implementation of the Transition Following the Reorganization and Adoption of the New Organizational Structure and Work Procedures</i>	
PERATURAN DIRJEN INDUSTRI AGRO	3 Tahun 2026	KETENTUAN DAN TATA CARA PENETAPAN LEMBAGA PELATIHAN SERTA LEMBAGA KONSULTAN DAN PENDAMPINGAN UNTUK PEMBINAAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN INDONESIA TERHADAP INDUSTRI HILIR KELAPA SAWIT	<i>Requirements and Procedures for the Designation of Training Institutions and Consulting and Assistance Institutions for the Development of the Implementation of Indonesian Sustainable Palm Oil Certification for the Downstream Palm Oil Industry</i>	ILB 5559/Juli 29, 2026
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 315/2026	KEWAJIBAN SERTIFIKASI TONGKANG BERBENDERA INDONESIA YANG BERLAYAR DI PERAIRAN INDONESIA UNTUK MENGANGKUT BIJIH NIKEL (NICKEL ORE)	<i>Certification Obligations for the Transportation of Nickel Ore for Indonesian-Flagged Barges Sailing in Indonesian Waters</i>	ILB 5546/Juli 23, 2026
KEPUTUSAN DIRJEN MINYAK DAN GAS BUMI	75.K/MG.06/DJM/2026	STANDAR DAN MUTU (SPESIFIKASI) BAHAN BAKAR MINYAK JENIS SOLAR (B50) YANG DIPASARKAN DI DALAM NEGERI	<i>Standards and Quality (Specifications) for Diesel Fuel (B50) Marketed Domestically</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	5/94/HK.03.01/V/2026	PEDOMAN PEMBINAAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA	<i>Guidelines for the Development of Occupational Safety and Health Experts</i>	
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 13/2026	PENGAWASAN OPERASIONAL KAPAL LANDING CRAFTTANK(LCT) ATAU KAPAL DENGAN KONSTRUKSI SERUPA MENJADI KAPAL PENUMPANG	<i>Operational Oversight of Landing Craft Tank (LCT) Vessels or Vessels with Similar Construction Converted into Passenger Vessels</i>	
SE DIRJEN PAJAK	SE-9/PJ/2026	TATA CARA PERMINTAAN INFORMASI DAN/ATAU BUKTI ATAU KETERANGAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN AKSES INFORMASI KEUANGAN UNTUK KEPENTINGAN PERPAJAKAN	<i>Procedures for Requesting Information and/or Evidence or Explanations in the Implementation of Access to Financial Information for Tax Purposes</i>	ILB 5550/Juli 24, 2026
	SE-8/PJ/2026	PEDOMAN PENGAWASAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK	<i>Guidelines for Monitoring Taxpayer Compliance</i>	ILB 5548/Juli 24, 2026
SE DIRJEN KAWASAN PERMUKIMAN	06/SE/Dp/2026	PETUNJUK TEKNIS FORMAT DAN MEKANISME PEMENUHAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA SERTA TATA CARA PENGANAAN SANKSI ADMINISTRATIF DALAM PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERUMAHAN	<i>Technical Guidelines on the Format and Mechanisms for Fulfilling Business Actors' Obligations and Procedures for the Imposition of Administrative Sanctions in the Organization of Risk-Based Business Licensing in the Housing Sector</i>	ILB 5529/Juli 15, 2026
	05/SE/Dp/2026	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN LAYANAN SISTEM INFORMASI REGISTRASI PENGEMBANG	<i>Implementation Guidelines for the Management of the Developer Registration Information System Services</i>	
SE DIRJEN BINA MARGA	16/SE/DB/2026	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BIDANG KONSTRUKSI DALAM RANGKA PENANGANAN DARURAT BENCANA MELALUI PENYEDIA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	<i>Guidelines for the Implementation of Construction Goods/Services Procurement for Disaster Emergency Response through Providers within the Directorate General of Highways</i>	
SE DIRJEN KESEHATAN LANJUTAN	HK.02.02/D/1600/2026	PENERAPAN JENIS DAN KLASIFIKASI RUMAH SAKIT PADA MASA TRANSISI KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO	<i>Implementation of Hospital Types and Classifications during the Transition Period of the Risk-Based Business Licensing Policy</i>	
PERATURAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2 Tahun 2026	PEMBENTUKAN DAN PUBLIKASI PRODUK HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Preparation and Publication of Legal Instruments within the Financial and Development Supervisory Agency</i>	

	1 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	<i>Organization of Civil Service Management within the Financial and Development Supervisory Agency</i>	
PERATURAN PERPUSTAKAAN NASIONAL	6 Tahun 2026	JEJARING PERPUSTAKAAN	<i>Library Network</i>	
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM	1 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN	<i>The Amendment to Regulation of the General Elections Commission Number 1 of 2025 on Continuous Updating of Voter Data</i>	
PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	2 Tahun 2026	PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENANGGULANGAN BENCANA	<i>Gender Mainstreaming in Disaster Management</i>	
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	6 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG JABATAN, KELAS JABATAN, DAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI	<i>The Amendment to Regulation of the Meteorology, Climatology, and Geophysics Agency Number 3 of 2025 on Positions, Position Classifications, and Employee Performance Allowances</i>	
PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	4 Tahun 2026	PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	<i>Business Processes within the Business Competition Supervisory Commission</i>	
PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	2 Tahun 2026	PENETAPAN PERSYARATAN GUDANG UNTUK BARANG YANG DISIMPAN DALAM SISTEM RESI GUDANG	<i>Specification of Warehouse Requirements for Goods Stored under the Warehouse Receipt System</i>	
	1 Tahun 2026	PERSYARATAN TEKNIS GUDANG DALAM SISTEM RESI GUDANG	<i>Technical Requirements for Warehouses under the Warehouse Receipt System</i>	
PERATURAN KETUA OMBUDSMAN	4 Tahun 2026	PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN MALADMINISTRASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	<i>Technical Guidelines for the Assessment of Maladministration in the Delivery of Public Services</i>	
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG	3 Tahun 2026	PUTUSAN PEMAAFAN HAKIM	<i>Judicial Pardon Decisions</i>	
	2 Tahun 2026	PEDOMAN PEMIDANAAN TINDAK PIDANA TERORISME TERTENTU	<i>Sentencing Guidelines for Certain Terrorism Offenses</i>	
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	13/2026	STANDAR CARA PEMBUATAN YANG BAIK UNTUK EKSIPIEN YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBUATAN OBAT	<i>Good Manufacturing Practices for Excipients Used in the Manufacture of Medicinal Products</i>	
	12 Tahun 2026	PENARIKAN DAN PEMUSNAHAN OBAT DAN/ATAU BAHAN OBAT YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT, MUTU, LABEL, DAN/ATAU INFORMASI PRODUK	<i>Recall and Destruction of Medicinal Products and/or Pharmaceutical Ingredients That Fail to Meet Standards and/or Requirements for Safety, Efficacy, Quality, Labeling, and/or Product Information</i>	
RANCANGAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		KRITERIA DAN TATA LAKSANA REGISTRASI OBAT	<i>Criteria and Procedures for the Registration of Medicinal Products</i>	
		PERUBAHAN ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN ANALISIS HASIL PENGAWASAN DALAM RANGKA IMPOR DAN EKSPOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN PREKURSOR FARMASI	<i>The Amendment to Regulation of the Indonesian Food and Drug Authority Number 1 of 2024 on Requirements and Procedures for Applying for Analysis of Inspection Results in Relation to the Import and Export of Narcotics, Psychotropic Substances, and Pharmaceutical Precursors</i>	
		TATA CARA PENERBITAN DOKUMEN EKSPOR OBAT	<i>Procedures for the Issuance of Export Documents for Medicinal Products</i>	
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN	10 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 14 TAHUN 2023 TENTANG PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON	<i>The Amendment to Regulation of the Financial Services Authority Number 14 of 2023 on Carbon Trading through the Carbon Exchange</i>	
	9 Tahun 2026	PELAPORAN INSIDENTAL MELALUI SISTEM PELAPORAN OTORITAS JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF, DAN BURSA KARBON	<i>Incidental Reporting through the Financial Services Authority Reporting System in the Capital Market, Financial Derivatives, and Carbon Exchange Sectors</i>	
	8 Tahun 2026	PELAPORAN DAN PERMINTAAN DATA TRANSAKSI PENDANAAN OLEH PENYELENGGARA LAYANAN PENDANAAN BERSAMA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI	<i>Reporting and Requests for Financing Transaction Data by Information Technology-Based Peer-to-Peer Lending Service Providers</i>	
RANCANGAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN		PEMERIKSAAN BANK	<i>Bank Examinations</i>	
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN	5 Tahun 2026	PEDOMAN PENGENDALIAN INTERNAL DAN PERILAKU PERUSAHAAN EFEK YANG MELAKUKAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PENJAMIN EMISI EFEK	<i>Guidelines for the Internal Control and Conduct of Securities Companies That Conduct Business Activities as Securities Underwriters</i>	
	4 Tahun 2026	PEDOMAN PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG, PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME, DAN PENCEGAHAN PENDANAAN PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH MASSAL BAGI WALI AMANAT	<i>Guidelines for the Implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction Programs for Trustees</i>	
	3 Tahun 2026	PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO	<i>Organization of Trading in Digital Financial Assets, Including Crypto Assets</i>	
RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN		PENERAPAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI PERUSAHAAN INDUK KONGLOMERASI KEUANGAN	<i>Implementation of Integrated Governance for Financial Conglomerate Holding Companies</i>	
PERATURAN KSEI	II-F	PENDAFTARAN BUKTI ELEKTRONIK KEPEMILIKAN EMAS (ELECTRONIC GOLD RECEIPT) DI KSEI	<i>Registration of Electronic Gold Receipts with the Indonesian Central Securities Depository (KSEI)</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA	Kep-00105/BEI/07-2026	PERUBAHAN PERATURAN PENGAWASAN PERDAGANGAN MELALUI BURSA KARBON	<i>The Amendment to Regulation on Supervision of Trading through the Carbon Exchange</i>	
	Kep-00104/BEI/07-2026	PERUBAHAN PERATURAN PERDAGANGAN UNIT KARBON MELALUI PENYELENGGARA BURSA KARBON	<i>The Amendment to Regulation on Trading of Carbon Units through Carbon Exchange Organizers</i>	
	Kep-00103/BEI/07-2026	PERUBAHAN PERATURAN PENDAFTARAN UNIT KARBON DI PENYELENGGARA BURSA KARBON	<i>The Amendment to Regulation on the Registration of Carbon Units with Carbon Exchange Organizers</i>	
	Kep-00102/BEI/07-2026	PERUBAHAN PERATURAN PENGGUNA JASA BURSA KARBON	<i>The Amendment to Regulation on Carbon Exchange Service Users</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA	KEP-066/DIR/KPEI/0726	PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE HAIRCUT	<i>Appointment of Members of the Haircut Committee</i>	
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	290/2026	PETUNJUK TEKNIS AUDIT INTERNAL SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	<i>Technical Guidelines for Internal Audits of the Food and Drug Regulatory Management System</i>	
	289/2026	PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN TERINTEGRASI	<i>Implementation of an Integrated Food and Drug Regulatory Management System</i>	
	265/2026	NILAI KANDUNGAN ZAT GIZI UNTUK PANGAN OLAHAN YANG DIPRODUKSI OLEH USAHA MIKRO	<i>Nutrient Content Values for Processed Foods Produced by Micro Enterprises</i>	

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL	160/2026	PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL PADA PENYEMBELIHAN HEWAN RUMINANSIA DAN UNGAS	<i>Guidelines for the Implementation of the Halal Product Assurance System During Ruminant and Poultry Slaughter</i>	
PETUNJUK DEPARTEMEN PENGEMBANGAN PASAR KEUANGAN	6/JUKNIS/EKSTERNAL/DPPK/2026	PEDOMAN PERIZINAN DAN PELAPORAN PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN SELF-REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	<i>Guidelines for the Licensing and Reporting of Financial Market Infrastructure Organizers and Providers, and the Operation of Self-Regulatory Organizations in the Money Market and Foreign Exchange Market</i>	
PETUNJUK TEKNIS DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN	1/JUKNIS/EKSTERNAL/DKSP/2026	IMPLEMENTASI KETENTUAN INDUSTRI SISTEM PEMBAYARAN	<i>Implementation of the Payment System Industry Regulatory Framework</i>	
SURAT EDARAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	6 Tahun 2026	PROFILING APARATUR SIPIL NEGARA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENERAPAN MANAJEMEN TALENTA INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEWUJUDKAN ASTA CITA DAN VISI MISI KEPALA DAERAH	<i>Profiling of Civil Servants to Accelerate the Implementation of Government Talent Management in Support of the Asta Cita Agenda and the Vision and Mission of Regional Heads</i>	
SURAT DEPARTEMEN KEBIJAKAN SISTEM PEMBAYARAN	28/466/DKSP/Srt/B	TANGGAPAN ATAS PERMOHONAN PERPANJANGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PENGGUNAAN RUPIAH	<i>Responses to Applications for the Extension of the Deferral of the Mandatory Use of the Rupiah</i>	
PERIODE I BULAN JULI 2026 (FIRST PERIOD OF JULY 2026)				
RUU		PUSAT FINANSIAL INTERNASIONAL INDONESIA	<i>The Indonesian International Financial Center</i>	
		KAWASAN INDUSTRI	<i>Industrial Estate</i>	
PP	27/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN ASET JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	<i>The Second Amendment to Regulation of the Government Number 99 of 2013 on the Asset Management of the Social Security Agency for Employment</i>	
PERMEN PEKERJAAN UMUM	13/2026	PERENCANAAN DAN PEMROGRAMAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM	<i>Planning and Programming for the Development of Public Works Infrastructure</i>	
PERMEN PERTANIAN	13/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 36/PERMENTAN/LB.070/8/2016 TENTANG PENGKAJIAN KEAMANAN PAKAN PRODUK REKAYASA GENETIK	<i>The Second Amendment to Regulation of the Minister of Agriculture Number 36/Permentan/LB.070/8/2016 on the Safety Assessment of Feed Derived from Genetically Engineered Products</i>	
PERMEN PERINDUSTRIAN	18/2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI TEKNOLOGI INDUSTRI DAN MANUFAKTUR	<i>Organization and Work Procedures of the Industrial and Manufacturing Technology Center</i>	
	17/2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI SERTIFIKASI PRODUK DALAM NEGERI	<i>Organization and Work Procedures of the Domestic Product Certification Center</i>	
	16/2026	PEMANFAATAN SKEMA KHUSUS PENYEDIAAN BARANG DAN/ATAU BAHAN MELALUI IMPOR BAGI PERUSAHAAN JASA INDUSTRI REPARASI DAN PEMELIHARAAN PESAWAT UDARA	<i>The Utilization of Special Scheme for the Provision of Goods and/or Materials Through Imports for Aircraft Repair and Maintenance Industry Service Companies</i>	
	15/2026	PROGRAM RESTRUKTURISASI MESIN DAN/ATAU PERALATAN PADA SEKTOR INDUSTRI AGRO	<i>Restructuring Program for Machinery and/or Equipment in the Agro-Industry Sector</i>	
	14/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA UNTUK MINYAK GORENG SAWIT SECARA WAJIB	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Industry Number 3 of 2025 on the Mandatory Enforcement of the Indonesian National Standard for Palm Cooking Oil</i>	
PERMEN PERDAGANGAN	20/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 43 TAHUN 2025 TENTANG MINYAK GORENG SAWIT KEMASAN DAN TATA KELOLA MINYAK GORENG RAKYAT	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 43 of 2025 on Packaged Palm Cooking Oil and the Governance of Public Cooking Oil</i>	
PERMEN KETENAGAKERJAAN	11 Tahun 2026	TATA CARA PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	<i>Procedures for Labor Inspection</i>	
PERMEN KESEHATAN	14/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAYANAN KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN	<i>The Second Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 30 of 2020 on Organization and Work Procedures of Healthcare Service Units of the Ministry of Health</i>	
	13/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 71 TAHUN 2020 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA POLITEKNIK KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN	<i>The Second Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 71 of 2020 on Organization and Work Procedures of Health Polytechnics within the Ministry of Health</i>	
	12 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 26 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR LABORATORIUM BIOLOGI KESEHATAN	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 26 of 2023 on Organization and Work Procedures of the Central Health Biology Laboratory</i>	
	10 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 28 TAHUN 2023 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 28 of 2023 on Organization and Work Procedures of Technical Implementing Unit for the Safety of Medical Devices and Health Facilities</i>	
PERMEN LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP	8 Tahun 2026	TATA CARA PENETAPAN DAN PERUBAHAN FUNGSI EKOSISTEM MANGROVE, PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA DASAR KESATUAN LANSKAP MANGROVE, SERTA PENYUSUNAN, PENETAPAN, DAN PERUBAHAN RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN EKOSISTEM MANGROVE	<i>Procedures for the Designation and Changes of Mangrove Ecosystem Functions, the Preparation, Designation, and Changes of Mangrove Landscape Unit Master Plans, and the Preparation, Designation, and Changes of Mangrove Ecosystem Protection and Management Plans</i>	
PERMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	8 Tahun 2026	PENGELOLAAN KONFLIK KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	<i>Management of Conflicts of Interest within the Ministry of Marine Affairs and Fisheries</i>	
PERMEN KEBUDAYAAN	5 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM	<i>Organization and Work Procedures of the Secretariat of the Film Censorship Agency</i>	
PERMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	14/2026	BADAN STANDAR DAN AKREDITASI NASIONAL PENDIDIKAN	<i>National Education Standards and Accreditation Agency</i>	
PERMEN KEUANGAN	43/2026	PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA ANGKUTAN UDARA NIAGA BERJADWAL DALAM NEGERI KELAS EKONOMI PADA PERIODE LIBUR SEKOLAH YANG DITANGGUNG PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Value-Added Tax on the Supply of Scheduled Domestic Commercial Economy Class Air Transportation Services During the School Holiday Period, Borne by the Government for the 2026 Fiscal Year</i>	
	42/2026	PENAMBAHAN INVESTASI PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA PADA LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Additional Capital Contribution by the Government of the Republic of Indonesia to International Financial Institutions for the 2026 Fiscal Year</i>	
	41/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN	<i>The Second Amendment to Regulation of the Minister of Finance Number 62 of 2023 on Budget Planning, Budget Implementation, and Accounting and Financial Reporting</i>	
PERMEN PANRB	9 Tahun 2026	PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU	<i>Government Employees under Part-Time Employment Agreement</i>	
PERMEN ESDM	10 Tahun 2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENGUJIAN MINYAK DAN GAS BUMI	<i>The Amendment to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 5 of 2022 on Organization and Work Procedures of the Center for Oil and Gas Testing</i>	
	9 Tahun 2026	KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	<i>Code of Ethics and Code of Conduct for Employees of the Ministry of Energy and Mineral Resources</i>	

PERMEN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	5 Tahun 2026	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA	<i>Procedures for Claims for State Compensation Against Non-Treasurer Civil Servants or Other Officials within the Ministry for the Protection of Indonesian Migrant Workers/Indonesian Migrant Workers Protection Agency</i>	
PERMEN DALAM NEGERI	14/2026	PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027	<i>Guidelines for the Preparation of the 2027 Regional Government Work Plan</i>	
	13/2026	PENYELENGGARAAN PELATIHAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI	<i>Implementation of Training for State Civil Apparatus in the Field of Home Affairs Governance</i>	
PERMEN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN	5 Tahun 2026	PEDOMAN PENGHITUNGAN INDEKS KETAHANAN AIR TINGKAT NASIONAL	<i>Guidelines for Calculating the National Water Security Index</i>	
PERMEN KOORDINATOR BIDANG PANGAN	4 Tahun 2026	KETERLIBATAN TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS	<i>Involvement of the Coordination Team for the Free Nutritious Meals Program in the Implementation of the Free Nutritious Meals Program</i>	
KEPMEN PERDAGANGAN	1522/2026	PENETAPAN PERSENTASE HAK EKSPOR KRATOM PERIODE JULI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2026	<i>Determination of the Kratom Export Rights Percentage for the July–December 2026 Period</i>	
	1505/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTAMBANGAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Mining Products Subject to Export Duty</i>	
	1503/2026	DAFTAR MEREK REFINED, BLEACHED, AND DEODORIZED PALM OLEIN DALAM KEMASAN BERMEREK DAN DIKEMAS DENGAN BERAT NETTO KURANG DARI ATAU SAMA DENGAN 25 KG	<i>List of Refined, Bleached, and Deodorized Palm Olein Brands in Branded Packaging and Packaged with Net Weight Less Than or Equal to 25 Kg</i>	
	1502/2026	HARGA PATOKAN EKSPOR DAN HARGA REFERENSI ATAS PRODUK PERTANIAN DAN KEHUTANAN YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM	<i>Export Benchmark Prices and Reference Prices for Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duties and Public Service Agency Service Tariffs</i>	
KEPMEN KEHUTANAN	521/2026	PELAKSANAAN STANDAR BIAYA MASUKAN LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN TAHUN ANGGARAN 2026	<i>Implementation of Standard Input Costs within the Ministry of Forestry for the 2026 Fiscal Year</i>	
	505/2026	FORUM SATU DATA KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>One Data Forum of the Ministry of Forestry</i>	
	501/2026	PELAKSANAAN PENILAIAN DAN PEMETAAN TALENTA APARATUR SIPIL NEGARA KEMENTERIAN KEHUTANAN	<i>Implementation of Talent Assessment and Mapping for State Civil Apparatus within the Ministry of Forestry</i>	
	496/2026	TIM PENGELOLA PROGRAM PEMANFAATAN PEMBAYARAN BERBASIS KINERJA REDUCING EMISSION FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION DALAM KERANGKA FOREST CARBON PARTNERSHIP FACILITY CARBON FUND DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	<i>Program Management Team for the Utilization of Results-Based Payments under the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Framework of the Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund in East Kalimantan Province</i>	
KEPMEN ESDM	274.K/MB.01/MEM.B/2026	HARGA MINERAL LOGAM ACUAN DAN HARGA BATUBARA ACUAN UNTUK PERIODE PERTAMA BULAN JULI TAHUN 2026	<i>Reference Metal Mineral Prices and Reference Coal Prices for the First Period of July 2026</i>	
	257.K/EK.01/MEM.E/2026	KEWAJIBAN PENCAMPURAN BAHAN BAKAR NABATI JENIS BIODIESEL DENGAN BAHAN BAKAR MINYAK BERUPA MINYAK SOLAR SEBESAR 50% (LIMA PULUH PERSEN) DALAM KERANGKA PEMBIAYAAN OLEH BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN	<i>Mandatory Blending of Biodiesel Biofuel with Diesel Fuel at 50% (Fifty Percent) under the Financing Scheme of the Plantation Fund Management Agency</i>	
KEPMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	198/2026	URAIAN MATERI MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH RAMAH	<i>Material Outline for the Child-Friendly School Orientation Period</i>	
KEPMEN INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BKPM	161.S/2026	PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 286 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN KAWASAN INDUSTRI UNTUK KEMUDAHAN LANGSUNG KONSTRUKSI	<i>The Amendment to Decree of the Minister of Investment and Downstream Industry/Head of the Investment Coordinating Board Number 286 of 2025 on the Designation of Industrial Estates Eligible for Direct Construction Facilitation</i>	
KEPMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	51/2026	DEWAN INSTITUT KELAUTAN INDONESIA (OCEAN INSTITUTE OF INDONESIA)	<i>Council of the Ocean Institute of Indonesia</i>	
	49/2026	PEMBENTUKAN TEMPAT KERJA BERSAMA PENYULUH PERIKANAN	<i>Establishment of Shared Workspaces for Fisheries Extension Officers</i>	
KEPMEN KEUANGAN	42/MK/BC/2026	PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR	<i>Determination of Export Prices for the Calculation of Export Duty</i>	
	40/MK/BC/2026	BARANG YANG DIBATASI UNTUK DIIMPOR BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 18 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16 TAHUN 2025 TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGATURAN IMPOR	<i>Goods Subject to Import Restrictions under Regulation of the Minister of Trade Number 16 of 2025 on Import Policies and Arrangements, as amended most recently by Regulation of the Minister of Trade Number 18 of 2026 on the Second Amendment to Regulation of the Minister of Trade Number 16 of 2025 on Import Policies and Arrangements</i>	
	26/MK/PK/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA INFRASTRUKTUR PELAYANAN PUBLIK UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	<i>The Third Amendment to Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 11/KM.7/2024 on the Classification of Public Service Infrastructure Expenditure Details for the Evaluation of Mandatory Expenditure Compliance under Regional Revenue and Expenditure Budgets</i>	
	25/MK/PK/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10/KM.7/2024 TENTANG PENANDAAN RINCIAN BELANJA PENDIDIKAN UNTUK EVALUASI PEMENUHAN BELANJA WAJIB DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	<i>The Third Amendment to Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia Number 10/KM.7/2024 on the Classification of Education Expenditure Details for the Evaluation of Mandatory Expenditure Compliance under Regional Revenue and Expenditure Budgets</i>	
SKB MENTERI PPPA, MENTERI SOSIAL, MENTERI HUKUM, MENTERI KESEHATAN, MENTERI KOMDIGI, KAPOLRI; KETUA LPSPK	3/MenPPA/SKB/vi/2026; 96/HUK/2026; M.HH-2.HH.04.05; HK.OI.08/MENKES/592/2026; 242; KB/4/vi/2026; KEP-283/1/LPSK/06/2026	PROGRAM PERCONTOHAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA	<i>Pilot Program for the Implementation of Integrated Services for Women and Children in the Special Capital Region of Jakarta Province</i>	
SKB MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN MENTERI DALAM NEGERI	1649/KPTS/M/2026; 600.10-1017 TAHUN 2026	DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN 3 JUTA RUMAH	<i>Support for the Acceleration of the Implementation of the Three Million Homes Development Program</i>	
SE MENTERI DALAM NEGERI	400.7/4803/SJ	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PENGUATAN PELINDUNGAN ANAK DI ERA DIGITAL	<i>Regional Government Support for Strengthening Child Protection in the Digital Era</i>	
PERATURAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	PER-6/BC/2026	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR PER-15/BC/2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DISTRIBUSI TARGET PENERIMAAN KEPABEANAN DAN CUKAI	<i>The Amendment to Regulation of the Director-General of Customs and Excise Number PER-15/BC/2023 on Guidelines for the Implementation of Customs and Excise Revenue Target Distribution</i>	

KEPUTUSAN DIRJEN BEA DAN CUKAI	KEP-146/BC/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI NOMOR KEP-173/BC/2024 TENTANG PENERAPAN SECARA PENUH (MANDATORY) KESEPAKATAN PENGAKUAN TIMBAL BALIK OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT ON AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR) ANTARA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI DENGAN ADMINISTRASI KEPABEANAN NEGARA ANGGOTA ASEAN	<i>The Third Amendment to Decree of the Director-General of Customs and Excise Number KEP-173/BC/2024 on the Full (Mandatory) Implementation of the Mutual Recognition Arrangement on Authorized Economic Operator between the Directorate General of Customs and Excise and the Customs Administrations of ASEAN Member States</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	KP-DJPL 283/2026	STANDAR PENGAWAKAN MINIMUM BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA DENGAN DAERAH PELAYARAN PERAIRAN SUNGAI DAN DANAU	<i>Minimum Safe Manning Standards for Indonesian-Flagged Vessels Operating in River and Lake Waters</i>	
KEPUTUSAN DIRJEN PERHUBUNGAN UDARA	PR-DJPU 3/2026	PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 139-23 TENTANG PROGRAM PEMELIHARAAN PERKERASAN (PAVEMENT MANAGEMENT SYSTEM)	<i>Technical Operational Guidelines for Civil Aviation Safety Regulation Part 139-23 on the Pavement Management System</i>	
	KP-DJPU 140/2026	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029	<i>Determination of Activity Performance Indicators for Airport Operator Unit Offices within the Directorate General of Civil Aviation for 2025-2029</i>	
	KP-DJPU 139/2026	PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TAHUN 2025-2029	<i>Determination of Activity Performance Indicators for Airport Authority Offices within the Directorate General of Civil Aviation for 2025-2029</i>	
SE DIRJEN BINA MARGA	14/SE/DB/2026	STANDAR KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN DAN JABATAN FUNGSIONAL PENATA LAKSANA JALAN DAN JEMBATAN	<i>Competency Standards for the Functional Positions of Road and Bridge Management Officers and Road and Bridge Operations Officers</i>	
SE DIRJEN PERHUBUNGAN LAUT	SE-DJPL 14/2026	PEDOMAN PENILAIAN KONDISI KAPAL (CONDITION ASSESSMENT SCHEME/CAS) BAGI KAPAL TANGKI MINYAK BERBENDERA INDONESIA DENGAN KONSTRUKSI DASAR TUNGGAL (SINGLE BOTTOM) DAN/ ATAU LAMBUNG TUNGGAL (SINGLE HULL) YANG TELAH BEROPERASI DI PERAIRAN INDONESIA	<i>Guidelines for Condition Assessment Schemes (CAS) for Indonesian-Flagged Oil Tankers with Single-Bottomed and/or Single-Hulled Constructions Operating in Indonesian Waters</i>	
SE DIRJEN PAJAK	SE-4/PJ/2026	RALAT SURAT EDARAN NOMOR SE-2/PJ/2026 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN	<i>Correction to Circular Number SE-2/PJ/2026 on Guidelines for the Implementation of Valuations for Tax Purposes</i>	
PERATURAN BANK INDONESIA	6 Tahun 2026	PELINDUNGAN KONSUMEN BANK INDONESIA	<i>Bank Indonesia Consumer Protection</i>	
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BI	19/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK	<i>The Second Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 7 of 2024 on Implementing Regulations for the Bank Foreign Funding Ratio</i>	
	18/2026	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG RASIO INTERMEDIASI MAKROPRUDENSIAL BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL, BANK UMUM SYARIAH, DAN UNIT USAHA SYARIAH	<i>The Second Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 23 of 2025 on the Macropprudential Intermediation Ratio and Macropprudential Liquidity Buffer for Conventional Commercial Banks, Sharia Commercial Banks and Sharia Business Units</i>	
	17/2026	PENGUATAN KUALITAS PELAKU DAN PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR PASAR KEUANGAN SERTA PENYELENGGARAAN SELF-REGULATORY ORGANIZATION DI PASAR UANG DAN PASAR VALUTA ASING	<i>Strengthening the Quality of Financial Market Infrastructure Participants and Organizers, and the Organization of Self-Regulatory Organizations in the Money Market and Foreign Exchange Market</i>	
	16/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG DEVISA HASIL EKSPOR DAN DEVISA PEMBAYARAN IMPOR	<i>The Third Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 4 of 2023 on Export Proceeds and Import Payments in Foreign Exchange</i>	
	15/2026	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING	<i>The Third Amendment to Regulation of the Members of Board of Governors Number 11 of 2024 on Foreign Exchange Market Transactions</i>	
	14/2026	TRANSAKSI LETTER OF CREDIT DI BANK INDONESIA	<i>Letter of Credit Transactions at Bank Indonesia</i>	
PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	4 Tahun 2026	PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN	<i>Policy Quality Assessment</i>	
	3 Tahun 2026	TATA KELOLA EKOSISTEM PEMBELAJARAN APARATUR SIPIL NEGARA	<i>Governance of the State Civil Apparatus Learning Ecosystem</i>	
PERATURAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	1 Tahun 2026	PENYULUHAN HAK ASASI MANUSIA	<i>Human Rights Education and Outreach</i>	
PERATURAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	2 Tahun 2026	PENERIMAAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	<i>Recruitment of Members of the Indonesian National Police Force</i>	
PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	5 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN PENILAIAN KOMPETENSI	<i>Organization and Work Procedures of the Competency Assessment Service Center</i>	
	4 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA	<i>Organization and Work Procedures of the National Cyber and Crypto Agency Professional Certification Body</i>	
	3 Tahun 2026	ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI LAYANAN KRIPTOGRAFI	<i>Organization and Work Procedures of the Cryptography Service Center</i>	
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK	4 Tahun 2026	PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI PADA BADAN PUSAT STATISTIK	<i>Competency Development through Integrated Learning System at the Central Bureau of Statistics</i>	
PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI	12 Tahun 2026	PERUBAHAN KEDUAPULUH ATAS PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG PENGATURAN PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>The Twentieth Amendment to Regulation of the Higher Education Accreditation Agency Number 13 of 2024 on Academic Programs Covered by Independent Accreditation Agencies</i>	
	11 Tahun 2026	KRITERIA MELAMPAUI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI BAGI PROGRAM STUDI YANG TERCAKUP DALAM LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI DESAIN PERENCANAAN LINGKUNGAN ARSITEKTUR	<i>Criteria for Exceeding the National Higher Education Standards for Academic Programs Covered by the Independent Accreditation Agency for Environmental Planning and Architectural Design</i>	
	10 Tahun 2026	PEDOMAN PENILAIAN KELAYAKAN PENDIRIAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI	<i>Guidelines for the Feasibility Assessment in Establishing an Independent Accreditation Agency</i>	
	9 Tahun 2026	PEDOMAN PELAPORAN PELAKSANAAN TUGAS MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEPADA MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI	<i>Guidelines for Reporting Performance of the Accreditation Council of the Higher Education Accreditation Agency to the Minister of Higher Education, Science, and Technology</i>	
PERATURAN BEI	II-E	PERDAGANGAN KONTRAK BERJANGKA	<i>Futures Contract Trading</i>	
PERATURAN KSEI	XI-C	TATA CARA PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN KUASA MELALUI ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI (EASY.KSEI)	<i>Procedures for the Organization of General Meetings of Bond and/or Sukuk Holders Accompanied by the Granting of Attorney Through the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI)</i>	
	XI-D	TATA CARA PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI DAN/ATAU SUKUK SECARA ELEKTRONIK YANG DISERTAI DENGAN PEMBERIAN SUARA MELALUI ELECTRONIC GENERAL MEETING SYSTEM KSEI (EASY.KSEI)	<i>Procedures for the Organization of Electronic General Meetings of Bond and/or Sukuk Holders Accompanied by Voting Through the KSEI Electronic General Meeting System (EASY.KSEI)</i>	
PERATURAN KEPALA BP BATAM	6 Tahun 2026	TATA CARA PEMANFAATAN ASET	<i>Procedures for the Utilization of Assets</i>	

PERATURAN BPOM	11 Tahun 2026	KEMASAN PANGAN	<i>Food Packaging</i>	
RANCANGAN PERATURAN BPOM		PELAKSANAAN FARMAKOVIGILANS OBAT BAHAN ALAM, OBAT KUASI, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK	<i>Implementation of Pharmacovigilance for Natural Medicines, Quasi Drugs, Health Supplements, and Cosmetics</i>	
PERATURAN OJK	7 Tahun 2026	KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM DAN PEMENUHAN MODAL INTI MINIMUM BANK PEREKONOMIAN RAKYAT	<i>Minimum Capital Adequacy Requirements and the Fulfillment of Minimum Core Capital for Rural Banks</i>	
	6 Tahun 2026	PERILAKU PENYAMPAI INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN	<i>The Conduct of Financial Services Sector Information Providers</i>	
RANCANGAN PERATURAN OJK		LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	<i>Credit Information Management Institutions</i>	
RANCANGAN RANCANGAN PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER		PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO COUNTRY RISK DAN TRANSFER RISK BAGI BANK UMUM	<i>The Application of Country Risk and Transfer Risk Management for Commercial Banks</i>	
		BENTUK DAN SUSUNAN LAPORAN BERKALA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH, DAN UNIT SYARIAH	<i>Form and Structure of Periodic Reports of Sharia Insurance Company, Sharia Reinsurance Company, and Sharia Business Unit</i>	
KEPUTUSAN KEPALA BPOM	224/2026	PENCABUTAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR HK.00.05.3.02706 TAHUN 2002 TENTANG PROMOSI OBAT	<i>Revocation of Decree of the Indonesian Food and Drug Authority Number HK.00.05.3.02706 of 2002 on Drug Promotion</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT KSEI	KEP-0034/DIR/KSEI/0626	PEMBERLAKUAN SISTEM PUSAT DATA TERINTEGRASI LAYANAN URUN DANA (SCFNET)	<i>Implementation of the Integrated Data Center System for Securities Crowdfunding Services (SCFNET)</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT KPEI	KEP-064/DIR/KPEI/0626	KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF ATAS PEMBERLAKUAN BIAYA LAYANAN JASA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI KONTRAK BERJANGKA	<i>Policy on the Granting of Incentives for the Imposition of Clearing and Settlement Guarantee Service Fees for Futures Contract Transactions</i>	
KEPUTUSAN DIREKSI PT BEI	Kep-00098/BEI/06-2026	PEMBEBASAN BIAYA PENCATATAN AWAL REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF YANG UNIT PENYERTAANNYA DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK DENGAN ASET YANG MENDASARI BERUPA EMAS	<i>Exemption from Initial Listing Fees for Exchange-Traded Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts with Gold as the Underlying Asset</i>	
SE DIREKSI PT BEI	SE-00008/BEI/07-2026	BIAYA TRANSAKSI EFEK DI SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF	<i>Securities Transaction Fees in the Alternative Market Organizer System</i>	
	SE-00007/BEI/07-2026	PARAMETER PERDAGANGAN TRANSAKSI REPURCHASE AGREEMENT (TRANSAKSI REPO) DI SISTEM PENYELENGGARA PASAR ALTERNATIF (SPPA)	<i>Trading Parameters for Repurchase Agreement (Repo) Transactions in the Alternative Market Organizer System (SPPA)</i>	

Peraturan Pemerintah	36 Tahun 2023	DEvisa HASIL EKSPOR DARI KEGIATAN PENGUSAHAAN, PENGELOLAAN, DAN/ATAU PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM	
	10 Tahun 2025	ORGANISASI DAN TATA KELOLA BADAN PENGELOLA INVESTASI DAYA ANAGATA NUSANTARA	
	38 Tahun 2002	DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA	
	39 Tahun 2010	ADMINISTRASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA	
	55 Tahun 2022	PENYESUAIAN PENGATURAN DI BIDANG PAJAK PENGHASILAN	
Peraturan Lembaga	7 Tahun 2023	DEvisa HASIL EKSPOR DAN DEvisa PEMBAYARAN IMPOR	
	11 Tahun 2024	TRANSAKSI PASAR VALUTA ASING	